

BAB IV KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sejarah Pekanbaru bermula dari sebuah kampung kecil bernama "Payung Sekaki" ditepian Sungai Siak. Kampung Payung Sekaki ini didirikan oleh Suku Senapelan dan pada akhirnya kampung tersebut dikenal sebagai Senapelan, akan tetapi nama Payung Sekaki lebih populer dari pada nama Senapelan itu sendiri. Pada waktu itu, sistem Pemerintahan Senapelan dikenal dengan sebutan "Kebathinan" dan nama pemimpinnya dinamai Bathin. Dibawah Pemerintahan Sultan Siak IV, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, Senapelan menadi pusat Kerajaan Siak. Beliau juga mengembangkan jalur perdagangan dengan menciptakan gagasan untuk membuat "pekan" yang mana aktivitasnya hanya pada hari tertentu dalam satu minggu. Setelah beliau wafat, gagasan pembuatan "pekan" dilanjutkan oleh anak laki-lakinya, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Kemudian, pada tanggal 23 Juni 1784, nama Senapelan secara resmi berganti nama menjadi Pekan Baharu atau Pekanbaru.

Ditinjau dari letak geografis, Kota Pekanbaru mempunyai letak yang strategis, yakni terletak ditengah-tengah Pulau Sumatera. Letak Pekanbaru adalah antara 101'27' Bujur Timur dan 0'31' Lintang Utara dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5-50 meter.

Adapun batas-batas Kota Pekanbaru adalah :

- Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Kampar
- Barat : Kabupaten Kampar

- Timur : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar

Luas wilayah Kota Pekanbaru keseluruhan adalah 632,26 Km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 58 Kelurahan.

4.2. Kehidupan Sosial-Politik Masyarakat Pekanbaru

Kota Pekanbaru yang dikenal dengan keheterogenan penduduknya dari berbagai suku, menimbulkan adaptasi istiadat yang berbeda, agama dan aktivitas yang berbeda pula. Oleh karena itu, sikap satu rasa, pola pikir dan rasa memiliki harus ditanamkan kepada setiap warga kota untuk mencintai Kota Pekanbaru sebagai Kotaku, Kotamu dan Kota Kita, sehingga terwujud kota yang BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha bersama, Aman dan Harmonis). Sebagaimana halnya sebuah moto, maka kata BERTUAH yang merupakan akronim dari sejumlah konsep itu diharapkan menjadi landasan operasional bagi masyarakat Pekanbaru dalam seluruh kehidupannya sehari-hari, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan sebagainya.

Penduduk Kota Pekanbaru sampai akhir tahun 2000 berjumlah 586.233 jiwa, terdiri dari bermacam-macam suku antara lain Melayu, Minang, Jawa, Tapanuli, Banjar, Bugis, dan keturunan asing lainnya. Suku Melayu, Minang, Jawa dan Tapanuli merupakan penduduk dengan jumlah terbesar di Kota Pekanbaru, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,99 % per tahun dengan kepadatan penduduk 827 jiwa per Km.

Perbedaan suku dan budaya ini tentu saja secara tidak disadari menimbulkan masalah tersendiri. Masalah dalam praktik otonomi adalah karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai latar budaya yang "berbeda" antara satu dengan yang lainnya. Artinya, harus diakui bahwa terdapat sejumlah perbedaan

penting dalam *setting* atau *Background* seseorang atau kelompok dalam sejarah yang mengkonsolidasikan persepsi-persepsinya tentang kehidupan, dan membedakan antara yang satu dengan lainnya. Sebagai konsekuensinya, latar tersebut menjadikan seseorang atau kelompok mendapatkan identitasnya, dan kemudian kita sepakat bahwa ada orang yang disebut orang Melayu, orang Minang, orang Jawa, orang Batak, orang Cina, dan sebagainya.

Masalahnya, bagaimana agar prinsip-prinsip otonomi yang dikembangkan selayaknya mampu mengakomodasi pluralitas budaya tersebut. Bagaimana mekanisme itu harus dibangun dan disosialisasikan terhadap prinsip-prinsip tersebut sehingga menjadi wacana yang operatif, terutama di tingkat Pemerintah Kota. Karena bagaimanapun juga Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak otonomi. Hal ini berangkat dari suatu fenomena, disamping kenyataan di atas, bahwa pergesekan-pergesekan keras, tampaknya akhir-akhir ini bergeser dari tingkat negara ke tingkat kabupaten. Artinya, ada kemungkinan mengelola konflik-konflik di tingkat kabupaten menjadi lebih sulit dan keras. Hal ini terjadi karena ajang "ruang-permainan" konflik dan perbedaan itu semakin kecil dan bersentuhan secara kongkret.

Berkaitan dengan kehidupan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat, meliputi antara lain meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan melalui pengembangan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Melihat perkembangan Kota Pekanbaru yang begitu pesat, dapat diketahui

bahwa potensi dan dinamika ekonomi Pekanbaru sangat potensial untuk dikelola lebih jauh. Artinya, dalam rangka mengantisipasi tuntutan-tuntutan otonomi, sesungguhnya Pekanbaru berpotensi untuk mengembangkan dirinya secara lebih strategis dan mandiri sesuai dengan tuntutan lokalitas dan wacana yang berkembang di tempat itu. Wacana yang berkembang tersebut adalah proses tawar-menawar antara berbagai kebijakan Pemerintah Kota dan aspirasi masyarakat yang heterogen tersebut. Dalam wacana tawar-menawar itulah seharusnya peran Humas Pemerintah Kota dapat dimaksimalkan.

Sejalan dengan hal diatas sudah selayaknya pemerintah Kota Pekanbaru membenahi dirinya untuk lebih mengembangkan kota sesuai dengan visi misi Kota Pekanbaru, salah satunya adalah memaksimalkan kinerja pegawainya (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

4.3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, telah nyata adanya persaingan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, sehingga pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan agar tetap berarti keberadaannya di masyarakat, serta dapat unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang cepat berubah, untuk itu ditetapkan visi Kota Pekanbaru: "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa." Rumusan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Pusat Perdagangan dan Jasa

Pusat perdagangan dan jasa menggambarkan keadaan pelaku-pelaku ekonomi

dan bisnis masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan 20 tahun ke depan. Dalam era globalisasi sistem tatanan perniagaan yang bebas dan distribusi penggunaan teknologi yang tepat guna, efektif dan efisien akan dapat meningkatkan peran serta para pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk selanjutnya ditumbuhkembangkan menjadi pelaku ekonomi dan bisnis bukan golongan ekonomi lemah.

2. Pusat Pendidikan

Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal di bidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyaringan sarana dan prasarana, pra pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

3. Pusat Kebudayaan Melayu

Pusat kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya melayu.

4. Masyarakat Sejahtera

Masyarakat sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada 20 tahun ke depan. Masyarakat dicita-citakan akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut, bebas dari kesukaran dan bencana serta kecukupan lahir dan batin secara seimbang dan selaras baik material maupun spiritual.

5. Iman dan Taqwa

Iman dan taqwa merupakan landasan spiritual, moral dan etika masyarakat

pada kondisi tertentu yang mempunyai pilihan akan sehat, daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan perilaku.

Untuk mewujudkan visi yang telah digali, maka ditetapkan misi Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif dengan berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menyediakan sekolah dan lembaga pendidikan yang unggul didukung tenaga potensial, sehingga dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas, mandiri, kreatif dan inovatif.
3. Melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan melayu yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan jati diri sehingga tercipta masyarakat maju, mandiri dan mampu bersaing.
4. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat.
5. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertqwa melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

4.4. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Kebijakan umum Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program kerja adalah :

1. Merumuskan dan melaksanakan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka menyusun statistic dan pelaporan.

2. Melaksanakan kebijakan fasilitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong-royong.
3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitas pelaksanaan peningkatan anak dan remaja, pelaksanaan perkreditan, pelaksanaan produksi dan pemasaran serta pelaksanaan perekonomian keluarga dan masyarakat.
4. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan fasilitas usaha ekonomi masyarakat.
5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas, rehabilitasi, konservasi pemanfaatan sumber daya alam.
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna.

Di lain pihak, sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program kerja antara lain :

1. Meningkatkan perekonomian yang kokoh.
2. Mengurangi jumlah penduduk yang miskin.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap lingkungan.
5. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan masyarakat, sehingga sosial ekonomi masyarakat seimbang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur pemerintah daerah terhadap tugas dan fungsi pelayanan.
 - b. Meningkatkan kadar efisiensi dan efektivitas peningkatan tugas dan fungsi terutama dalam penggunaan sumber daya keuangan dan peralatan yang tersedia.
2. Meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan umum pemerintahan. Kegiatan ini dilakukan melalui dua kegiatan utama yaitu :
 - a. Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi terutama dari bidang-bidang kewenangan perpajakan dan retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Eksistensi penerimaan retribusi dari penerimaan bidang-bidang kegiatan potensial yang memungkinkan tanpa harus menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi sektor swasta dan masyarakat.
3. Meningkatkan kadar kemitraan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga legislatif dalam rangka membangun sebuah format penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis dan berorientasi pada pelayanan publik.
4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan yang tangguh dikalangan para pengusaha dan masyarakat, terutama para pengusaha yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi yang berorientasi pada :

- a. Pengolahan dan pemantauan produksi pertanian serta produksi lokal.
 - b. Pasar luar negeri.
 - c. Menciptakan dan penerapan tenaga kerja.
- 5.. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan semua pihak terkait terutama tokoh-tokoh politik, LSM, Universitas dan Organisasi Profesi dan kepemudaan dalam rangka membangun iklim dan situasi sosial demokratis yang dinamis dan sejuk.